

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan koperasi begitu besar dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia kegiatan perekonomian dibagi menjadi tiga yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Menurut Muhammad Hatta (1994) koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. (Retno,sari 2019)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang, perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan menurut UUD 1945 pasal 33 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan adanya penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Jadi

koperasi adalah tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mensejahterkan anggota dan masyarakat dengan asas kekeluargaan. (Purnawati 2018)

Pembangunan koperasi di Indonesia cukup mengalami kemajuan yang signifikan. Dilihat dari dasar hukum dalam Undang-undang 1945, koperasi memperoleh hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia, pembangunan koperasi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan tersistem dalam mempraktikkannya menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan koperasi mengalami kemunduran. Hal ini terlihat dari beberapa koperasi yang sudah tidak aktif lagi, seperti koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng.

Menurut Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, penyebab utama tidak aktifnya koperasi adalah kurangnya sistem pengelolaan sumber daya keuangan dan koperasi tidak melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam kinerja koperasi setiap tahunnya. Adapun data koperasi yang aktif dan tidak aktif di kabupaten Buleleng yaitu :

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng

No	Koperasi	Total		
		Aktif	Tidak aktif	Jumlah
1	Tejakula	25	0	25
2	Kubutambahan	11	2	13
3	Sawan	25	8	33
4	Sukasada	30	3	33
5	Buleleng	128	24	152
6	Banjar	19	4	23
7	Seririt	18	2	20
8	Busungbiu	8	1	9
9	Gerogak	36	5	41

Jumlah	300	49	349
---------------	------------	-----------	------------

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 25 tahun 2015 tentang Renvitalitas Koperasi, “Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif dan koperasi menjadi lebih besar”. (Hidayat 2018)

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, pada kenyataannya masih banyak koperasi di kabupaten Buleleng yang tidak menyelenggarakan RAT. Adapun beberapa koperasi tidak menyelenggarakan RAT permasalahan manajerial, perkembangan usaha maupun aspek keuangan. Minimnya sarana dan prasarana operasional dalam pengawasan koperasi dan tingkat mutasi aparatur di daerah cukup tinggi sehingga menjadi kendala dalam pengawasan koperasi. Selain itu, beberapa koperasi dalam pelaporan keuangan masih kurang valid dan terdapat keliruan. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait pembinaan koperasi saat ini adalah kelambatan penyampaian data laporan kinerja tahunan koperasi atau laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam mendorong eksistensi koperasi.

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang dapat dikatakan cukup besar, yaitu pemerintah meminta agar koperasi memiliki data yang valid dan akurat mengenai laporan keuangannya, sehingga pemerintah dapat memantau keadaan koperasi tersebut. Pemerintah juga mengharapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi diberikan bimbingan dan pelatihan sehingga nantinya

menjadi karyawan yang profesional baik dalam mengelola data maupun keuangan pengelolaan data meliputi pengumpulan, pengolahan analisis dan pelaporan yang membutuhkan keterampilan dalam meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan data yang lebih optimal. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah pasal 152 mengemantatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan teknologi bisa menjadi inovasi baru yang mampu mengatasi kendala tersebut. Pengembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh koperasi untuk meningkatkan perkembangan koperasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengembangan melalui *Online Data System* (ODS). *Online Data System* adalah sistem aplikasi pendataan koperasi dan UKM yang dapat diakses secara online baik oleh dinas Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pemerintah Pusat yang telah diberikan kewenangan. Adanya aplikasi ini memberikan manfaat untuk pemenuhan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pelaku dan gerakan koperasi melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT). Melalui ODS diharapkan dapat menekankan pembangunan koperasi yang berkualitas baik dari aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan. Selain diharapkan dapat meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha yang berbasis anggota yang kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui kemajuan teknologi.

Dasar koperasi melakukan input data melalui ODS yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per.M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha, Usaha Kecil dan

Menengah, dimana pada peraturan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki kewajiban dalam melakukan input data sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan adanya ODS dapat memudahkan dalam mengakses informasi koperasi yang ada di Indonesia. Selain itu dapat memudahkan pemerintah untuk mengatasi munculnya koperasi yang hanya muncul ketika sedang ada bantu program. *Online Data System* yang telah dibuat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang telah dibuat bersifat *genaral* dan tidak dapat dirubah, maka Provinsi Bali memerlukan data koperasi lebih detail. Hal itu membuat provinsi bali menciptakan sebuah sistem aplikasi yang mampu menampilkan data koperasi secara detail yang diberi nama *Online Data Koperasi (ODK)*.

Online Data Koperasi (ODK) merupakan *system* data digital yang berbasis *web* yang dibangun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. ODK ini melibatkan koperasi secara mandiri dan aktif di dalam penginputan dan pengolahan data. Pemerintah menciptakan ODK untuk mendorong perkembangan koperasi secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi. Jadi dengan adanya *Data Online Koperasi (ODK)* dapat membantu perkoperasian yang ada di Kabupaten Buleleng dalam mengambil kebijakan sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat, dan mengembangkan perkoperasian di Kabupaten Buleleng. Dalam penggunaan ODK ini perlu pengimplementasian penggunaan dan diharapkan pemerintah mendorong untuk mengikuti perkembangan jaman untuk memanfaatkan kemajuan Informasi

Teknologi (IT), agar koperasi terjaga eksistensinya dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya.

Pengembangan koperasi harus dikembangkan dan ditingkatkan secara efisien, mengingat koperasi merupakan wadah perekonomian yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Cara sistem penginputan data ke sistem *Online Data Koperasi* hampir sama dengan penginputan data ke sistem *Online Data System*, hanya saja data yang sudah di input di *Online Data System* tidak bisa dirubah dan bersifat permanen. Sistem *Online Data Koperasi (ODK)* dapat mengetahui letak koperasi melalui peta koperasi, pelaksanaan mengenai Rapat Anggota (RAT), dan mengenai laporan keuangan koperasi sehingga memberikan informasi yang spesifik lengkap dan akuntabel yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perkoperasian. Dengan adanya ODK pemerintah dan masyarakat dapat mengakses informasi, melihat data koperasi yang resmi yang ada dengan menyajikan portofolio mengenai perjalanan koperasi dari terbentuknya sampai keadaan terkini.

Pengisian data di *Online Data Koperasi (ODK)* perlu adanya portofolio yang kuat untuk pelaporan data ODK tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Buleleng mengadakan sosialisasi mengenai bimbingan teknologi cara pelaporan koperasi melalui *Online Data Koperasi (ODK)*. Hal ini dilakukan agar koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng mengerti dan memahami bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Pemerintah mengharapkan dukungan dan kerja sama dari setiap koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dalam penerapan ODK ini. Untuk kemajuan dan pengembangan koperasi khususnya di Kabupaten Buleleng.

Online Data Koperasi (ODK) yang ada di Provinsi Bali dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh dikoperasi. *Online Data Koperasi* sangat membantu dalam menyediakan data koperasi yang di detail untuk pemerintah tetapi, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, *Online Data Koperasi* belum digunakan secara menyeluruh oleh koperasi, seperti koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Online Data Koperasi* Dalam Rangka Meningkatkan Pengembangan Koperasi Kabupaten Buleleng**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana proses dalam penerapan *Online Data Koperasi* dalam rangka pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng ?
- 1.2.2 Kendala apa yang di hadapi dalam penerapan *online Data Koperasi* dalam rangka pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng?
- 1.2.3 Bagaimana analisis penerapan *Online Data Koperasi* dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1.3.1 Untuk mengetahui proses pererapan *Online* Data Koperasi dalam rangka pengembangan koperasi di kabupaten Buleleng.

1.3.2 Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan *Online* Data Koperasi dalam pengembangan koperasi dikabupaten Buleleng.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Online* Data Koperasi dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan diadakanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini bermanfaatn untuk menambah wawasan mengenai penerapan *Online* Data Koperasi (ODK) dalam rangka pengembangan koperasi di kabupaten Buleleng.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam penginputan data koperasi bagi koperasi dalam penerapan *Online* Data Koperasi (ODK) dalam rangka pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng.

1.4.2.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menambah informasi maupun menambah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam analisis penerapan *Online Data Koperasi* (ODK) dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng.

1.4.2.3 Bagi Penelitian lain dan pihak-pihak yang memerlukan

Hasil penelitian ini dapat digambarkan atau digunakan sebagai bahan penginputan yang akan menambah pengetahuan bagi pembaca dan untuk penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan informasi juga dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.

